

HUBUNGAN ANTAR-PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DI SUMATRA SELATAN

THE RELATIONSHIP AMONG STAKE-HOLDER IN DEVELOPING RUBBER INDUSTRIAL CLUSTER IN SOUTH SUMATRA

Dian Novriadhy

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatra Selatan
Jln. Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang 30137
Pos-el: dian_811@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine the relationship among stake-holder in the effort of developing rubber industry cluster in South Sumatra. The research method is carried out by identifying the relationships among stake-holders, policies and regulations that support the development of rubber industrial cluster, and their implementation. The results indicate there is not any relationship among stake-holders. Nevertheless, policies and regulations give significant effect to the development of rubber industry in South Sumatra.

Keywords: *Industrial cluster, Business relationship, Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet dalam upaya pengembangan klaster industri di Sumatra Selatan. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi hubungan antar-pemangku kepentingan, mengidentifikasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan klaster industri karet, dan mengidentifikasi penerapan kebijakan dan regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakterhubungan antar-pemangku kepentingan industri karet. Meskipun begitu, kebijakan dan regulasi memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan industri karet di Sumatra Selatan.

Kata kunci: Klaster industri, Hubungan usaha, Kebijakan

PENDAHULUAN

Sumatra Selatan merupakan penghasil komoditas karet terbesar di Indonesia. Berdasarkan volume, karet yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Faktor utama yang menunjang peningkatan produksi karet adalah peningkatan luas perkebunan karet yang mayoritas merupakan perkebunan rakyat. Luas perkebunan karet di tahun 2009 mencapai 1.058.420 ha atau meningkat sebesar 3,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah

kepala keluarga yang terlibat dalam sektor karet tercatat sebanyak 570.143 KK di tahun 2009.¹

Perkembangan positif sektor karet juga diperlihatkan dari peningkatan volume ekspor. Volume ekspor karet Sumatra Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 volume ekspor karet Sumatra Selatan tercatat 643.804 ton; 658.840 ton; 676.416 ton; dan 756.747 ton. Meskipun berdasarkan volume ekspor selalu menunjukkan peningkatan, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap nilai ekspor. Nilai ekspor

karet Sumatra Selatan mengalami penurunan di tahun 2009 sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya.² Hal tersebut terjadi karena produk ekspor karet Sumatra Selatan didominasi oleh *crumb rubber* yang dalam perdagangan dunia harganya berfluktuasi.

Nilai tambah yang diperoleh dari *crumb rubber* sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai tambah yang diperoleh dari barang jadi karet (*finished goods*). Oleh karena itu, pengembangan industri karet harus diarahkan ke dalam pengembangan industri barang jadi karet. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan pengembangan klaster industri karet.

Penelitian berkaitan dengan klaster industri telah dilakukan. Salah satu diantaranya Potensi Klaster Komoditas Karet oleh Sumini Abdul Salam.³ Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas elemen pasar, sedangkan penelitian ini membahas elemen hubungan antar-pemangku kepentingan.

Penulis menduga bahwa tidak berkembangnya klaster industri karet di Sumatra Selatan dikarenakan tidak adanya hubungan yang baik antar-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet menjadi penting. Hal itu dilakukan untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan klaster industri karet di Sumatra Selatan. Selain itu, juga penelitian ini penting mengingat di era pasar bebas serbuan produk impor dari mitra dagang Indonesia dengan leluasa masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, dapat tidaknya industri karet menjadi tuan rumah di negeri sendiri sangat bergantung dari kemampuannya dalam diversifikasi komoditas karet.

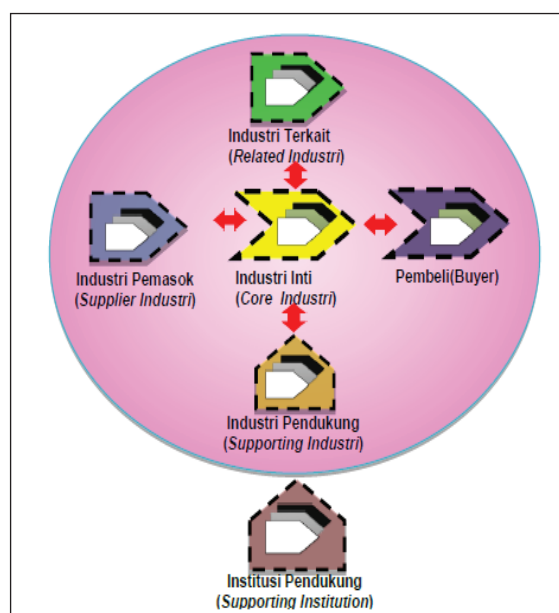
Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet di Sumatra Selatan? dan upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan klaster industri karet di Sumatra Selatan?

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet di Sumatra Selatan dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengembangkan klaster industri karet di Sumatra Selatan

Klaster industri sebenarnya merupakan kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan (peningkatan) nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun nonbisnis.⁴ Klaster industri berbeda dengan sentra industri. Dalam klaster industri tidak dipersyaratkan adanya kesamaan jenis usaha dan produk yang dihasilkan. Perbedaan juga terjadi dalam hal lokasi. Industri dalam suatu klaster tidak harus berdekatan secara geografis dan berada dalam wilayah administratif tertentu. Hal terpenting dari klaster industri adalah keterkaitan suatu industri dengan industri lainnya.

Gambar 1 memberikan ilustrasi mengenai hubungan industri dalam suatu klaster industri. Industri inti adalah industri yang menjadi fokus dalam klaster. Industri inti dalam suatu klaster dapat saja berubah menjadi industri terkait dalam klaster industri lainnya. Industri pendukung merupakan industri yang mendukung kegiatan usaha dari industri inti, umumnya merupakan industri jasa seperti jasa transportasi, jasa tenaga kerja, jasa pembiayaan, dan jasa lainnya. Industri terkait adalah industri yang menggunakan infrastruktur yang sama.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa hubungan industri tersebut lebih dari sekadar hubungan jual-beli saja. Hubungan industri harus memiliki peranan dalam peningkatan nilai



Gambar 1. Model Generik Klaster Industri
Sumber: BP Nugroho⁵

tambah. Dalam kalimat lain dapat dinyatakan hubungan industri tersebut melibatkan pertukaran informasi dan pengetahuan yang bermuara dengan munculnya inovasi.

Keterkaitan klaster industri dengan sistem inovasi sangat erat. Menurut OECD sebagaimana dikutip dari Dedy Saputra,⁶ klaster dapat disebut *reduced-scale* dari sistem inovasi. Hal ini disebabkan klaster menekankan adanya interaksi antar-pemangku kepentingan dalam sektor tertentu dimana terbentuknya *networking* antar-pemangku kepentingan juga menjadi penekanan dalam sistem inovasi. Pemangku kepentingan dalam sistem inovasi umumnya terdiri dari unsur pemerintah, unsur bisnis, dan unsur litbang. Tabel 1 memberikan panduan untuk mengetahui tipe hubungan dan karakteristik tipe pembelajaran (pertukaran informasi) antar-pemangku kepentingan.

Berdasarkan dokumen Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 tertuang bahwa karet merupakan salah satu dari dua puluh dua kegiatan ekonomi utama.⁸ Dalam dokumen MP3EI digunakan tiga strategi utama, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan Penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Keberadaan strategi utama dalam kerangka desain pendekatan MP3EI dapat dilihat dalam Gambar 2. MP3EI sebenarnya masih *debatable* di kalangan ahli tetapi penulis sengaja menggunakan perpres ini sebagai materi dalam tulisan. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara MP3EI dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Kesesuaian tersebut, antara lain dalam hal strategi penguatan kemampuan SDM dan iptek, pengembangan Sistem Inovasi Daerah, dan pengembangan pusat unggulan (*center of excellent*).

Sumatra Selatan berdasarkan koridor ekonomi berada di koridor satu dengan tema sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil bumi

Tabel 1. Tipe Hubungan, Tujuan dan Tipe Pembelajarannya

Tipe hubungan	Tujuan	Tipe pembelajaran
Kemitraan	pemecahan masalah secara bersama, pembelajaran dan inovasi. Ciri khas dinyatakan dalam perjanjian formal atau nota kesepahaman, berinteraksi sangat tinggi, melibatkan dua organisasi atau lebih dan fokus pada tujuan yang telah ditentukan.	Pembelajaran melalui interaksi, terkadang dengan meniru dan mengamati
Paternalistik	Memberikan barang, pelayanan dan pengetahuan kepada pengguna tanpa menghiraukan kebutuhan pengguna	Pembelajaran melalui pelatihan
Konsultasi	Pembelajaran atau pemecahan masalah dengan bantuan pihak lain, diatur secara formal. Interaksi berdasarkan hubungan penyedia-pengguna. Fokus terhadap tujuan yang tertera dalam perjanjian terkait barang dan jasa.	Pembelajaran dengan meniru dan berlatih sampai ahli
Jejaring	Tujuan utama untuk memfasilitasi pertukaran informasi baik secara formal maupun nonformal. Menyediakan informasi awal kepada kelompok terhadap perubahan kebijakan, pasar dan teknologi. Menciptakan modal sosial, kepercayaan, kesiapan terhadap perubahan, meminimalkan hambatan dalam membentuk hubungan baru	Pembelajaran melalui interaksi dan mengamati
Advokasi	Hubungan khusus melalui jejaring dan asosiasi untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan	Pembelajaran interaktif
Perserikatan	Kerja sama dan berbagi manfaat.	Pembelajaran dengan berbagi pengalaman
Hubungan jual beli	Utamanya organisasi diatur secara informal terkadang ada yang bersifat formal bertujuan untuk akses bahan mentah, pasar, pembiayaan, dan hibah.	Kesempatan untuk pembelajaran terbatas, beberapa pembelajaran melalui interaksi

Sumber: Andy Hall⁷

dan lumbung energi nasional. Dalam koridor ini ada lima aktivitas utama, yaitu kelapa sawit, karet, batu bara, besi baja, dan industri perkapalan. Oleh karena itu, pengembangan klaster industri karet di Sumatra Selatan menjadi relevan.

Informasi lebih rinci pengembangan klaster industri karet dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 112/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*road map*) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet. Dalam dokumen ini tertera sasaran, strategi pengembangan dan pokok-pokok rencana aksi sampai dengan tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Sumatra Selatan pada bulan Juli–September 2011. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapang, pengisian kuesioner, dan dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka dan internet.

Dalam penelitian ini penulis memilih responden dengan metode *perspial*. Responden dibagi menjadi tiga unsur yaitu unsur pemerintah, unsur bisnis, dan unsur litbang. Hal ini diperlukan karena adanya perbedaan karakteristik perilaku dalam menjalankan tugas fungsinya. Jumlah responden sebanyak 7 responden dari vulkanisir

ban, 5 responden dari industri *crumb rubber*, 4 lembaga litbang, 5 satker dari dinas dan badan yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara:

- 1) Menganalisis hasil kuesioner untuk menentukan tipe hubungan antar-pemangku kepentingan
- 2) Pengelompokan hasil analisis ke dalam bentuk matriks berdasarkan tipologi dalam Tabel 1
- 3) Mengidentifikasi kebijakan dan regulasi terkait dengan pengembangan klaster industri karet
- 4) Mengidentifikasi penerapan kebijakan dan regulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa getah karet diolah dalam dua bentuk. Bentuk pertama, getah karet dibekukan dengan bahan koagulan sehingga diperoleh getah karet padat atau dikenal dengan istilah *slab*. *Slab* merupakan bahan baku utama untuk industri kompon padat karet. Bentuk kedua, getah karet dipertahankan



Tabel 2. Kerangka Desain Pendekatan MP3EI⁸

dalam bentuk cair atau dikenal dengan istilah lateks.

Perbedaan cara pengolahan ini membedakan pelaku usaha (bisnis) yang terlibat dalam industri karet. Tabel 2 menyajikan pemangku kepentingan industri karet yang teridentifikasi dalam observasi lapangan.

Hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet dapat dilihat dalam Tabel 3. Dalam Tabel 3 tersebut terlihat bahwa tidak terjadinya pertukaran informasi yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas karet. Hal ini menjawab dugaan penulis bahwa tidak berkembangnya klaster industri karena belum terjalinnya hubungan antar-pemangku kepentingan.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan tidak terjadinya hubungan antar-pemangku kepentingan. Untuk kemudahan penulis akan membahas satu per satu.

Pertama, hubungan antara unsur bisnis dengan unsur bisnis. Hambatan pertama, adanya ketidakpercayaan kepada industri lain terutama terkait adanya kompetisi dalam akses penguasaan bahan baku. Data bulan September 2011 menunjukkan kapasitas produksi getah karet rakyat hanya dalam kisaran 800–900 ribu ton, sedangkan kapasitas terpasang industri pengolahan getah karet mencapai 1,327 juta ton.⁹ Hambatan kedua, adanya kesamaan produk yang dihasilkan. Industri karet dominan di Sumatra Selatan saat ini ada 24 Industri. Industri yang memiliki kesamaan produk berjumlah 20 perusahaan.¹⁰ Adanya kompetisi dalam akses bahan baku dan akses pasar komoditas yang sama membuat kecenderungan terjadinya pembatasan pertukaran informasi dan menganggap pelaku usaha lain sebagai kompetitor murni.

Tabel 2. Pemangku kepentingan industri karet di Sumatra Selatan

Kategori	Pelaku Usaha
Bisnis	Petani karet, pengepul, industri crumb rubber, industri lateks, usaha vulkanisir (IKM), industri kimia pendukung, jasa pengangkutan dan jasa lainnya
Pemerintah	Balitbangnovda, Disbun, Distan, Disperindag, Diskop-UKM dan SKPD terkait, Instansi vertikal
PT dan Litbang	Baristand Industri, Puslit Sembawa, Unsri dan Litbang lainnya

Sumber : data primer, diolah

Tabel 3. Matriks hubungan antar-pemangku kepentingan

	Bisnis	Pemerintah	Litbang
Bisnis	• Hubungan bersifat bisnis (jual beli) • Belum terjadi pertukaran informasi • Belum terjadi hubungan dalam pengembangan SDM	• Hubungan bersifat administratif • Belum terjadi hubungan dalam peningkatan nilai tambah	• Belum terjadi hubungan dalam peningkatan kapasitas SDM • Belum terjadi upaya difusi inovasi hasil litbang • Hubungan riset dan peningkatan kapasitas produksi bersifat insidental
Pemerintah		• Hubungan bersifat administratif • Pertukaran informasi lintas sektoral tidak berjalan dengan baik	• Hasil litbang belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan • Hubungan lebih terfokus pada pendanaan riset bukan pertukaran informasi
Litbang			• <i>Joint research</i> antar litbang belum optimal • Pertukaran informasi terbatas, umumnya melalui seminar dan publikasi jurnal

Sumber: Data primer, diolah

Kedua, hubungan unsur bisnis dengan unsur pemerintah. Pola yang terbentuk selama ini adalah pola paternalistik. Pola ini memposisikan pemerintah sebagai “yang paling tahu kebutuhan”. Pola ini paling jelas terlihat dari pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan bantuan untuk industri kecil menengah. Bantuan peralatan dari pemerintah dalam banyak kasus tidak memerhatikan kesiapan IKM terkait kemampuan merawat, penyediaan sumber tenaga, dan kapasitas produksi.

Ketiga, hubungan unsur bisnis dengan unsur litbang. Ketidakterhubungan pertukaran informasi antara unsur bisnis dan unsur litbang disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, hasil litbang tidak memerhatikan nilai universal dalam dunia bisnis. Nilai universal yang dimaksud adalah kemudahan untuk digunakan, dapat direproduksi, dapat diproduksi dengan harga yang wajar, dan nilai-nilai lainnya yang aspek bisnis. Faktor kedua, merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Suatu teknologi/ invensi memiliki unsur ketidakpastian. Bagi bisnis ketidakpastian merupakan sesuatu yang sangat dihindari.

Keempat, hubungan unsur pemerintah dengan unsur pemerintah. Dalam era desentralisasi terjadi kecenderungan untuk terjadinya *loss control* yakni suatu kondisi dimana dimungkinkan terjadinya program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetapi luput dari perhatian pemerintah pusat. Hal ini disebabkan telah

bergesernya pola hubungan dari sifatnya vertikal menjadi koordinasi. Sebelum era desentralisasi semua data dan informasi diteruskan ke satker pusat tetapi saat ini kecenderungan yang terjadi data dan informasi hanya sampai di satker pusat jika diminta.

Dukungan kebijakan dan regulasi adalah salah satu keunggulan dari Sumatra Selatan dalam pengembangan klaster industri karet. Indikator dari dukungan kebijakan dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tabel 4 merekapitulasi beberapa kebijakan, regulasi dan implementasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 4 menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam pengembangan klaster industri karet. Pertanyaan terpenting dari informasi yang disajikan dalam Tabel 4 adalah apakah regulasi/ kebijakan tersebut memiliki efek nyata. Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut penulis sajikan fakta perkembangan terakhir dimana penulis terlibat dalam kegiatan tersebut.

Tahun 2010, Tim SIDA Sumatra Selatan menginisiasi pendirian Sentra Souvenir berbahan baku karet di Talang Kedondong Palembang. Pendirian sentra ini diawali dari rekomendasi yang dihasilkan dalam *Expert Meeting*. Tahapan yang dilakukan dalam pendirian sentra souvenir ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Kebijakan, Regulasi dan implementasi

Kebijakan dan regulasi	Implementasi	Keterangan
Perpres No. 32 Tahun 2011	Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi Karet (PUIK)	Penandatanganan MoU Konsorsium PUIK antara Pemprov Sumatra Selatan, Unsri, BP KIMI, Puslit Karet, Gapkindo dan Apkarindo. PUIK diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2011.
Permen Perindustrian No. 112/M-IND/PER/10/2009	Pembentukan <i>working group</i> , bantuan mesin industri kompon karet	Bantuan mesin kompon terdapat di kabupaten OKI, Ogan Ilir dan Palembang ¹¹
SK GUB SUMSEL No. 282/KPTS/Balit-bangda/2010	Pembentukan Inkubator Teknologi Sumatra Selatan	Memiliki misi menumbuhkan pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT)
SK GUB SUMSEL No. 280/KPTS/Balit-bangda/2010	Pembentukan Sentra HKI Sumatra Selatan	Memiliki misi melindungi kekayaan intelektual terutama kekayaan komunal
SK GUB SUMSEL No. 478/KPTS/Balit-bangda/2010	Pembentukan Asosiasi Peneliti Sumsel	Memiliki misi antara lain meningkatkan kompetensi peneliti, difusi iptek
	Pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sumatra Selatan	SIDa Sumsel diluncurkan pada tanggal 14 Oktober 2010

Sumber : www.balibangdasumsel.net dan sumber lainnya

- 1) Tahap pertama, melakukan kerja sama dengan BPPT dalam pengembangan inkubator teknologi.
- 2) Tahap kedua, melakukan pembinaan *tenant*, sebagai agen perubahan di masyarakat.
- 3) Tahap ketiga, pembinaan masyarakat untuk membentuk sentra souvenir
- 4) Tahap keempat, melakukan pendampingan kewirausahaan untuk pelaku usaha baru (pelaksanaan berbagi peran dengan SKPD disperindag dan diskop-ukm)
- 5) Tahap kelima, pengayaan teknologi yang dilakukan oleh BPPT, Baristand Industri Palembang dan Puslit Karet.
- 6) Tahap keenam, dukungan modal usaha melalui mekanisme CSR dari PT Bukit Asam dan Bank Sumselbabel.

Dari tahapan-tahapan pendirian sentra souvenir yang telah dilakukan terlihat bahwa kebijakan dan regulasi yang ada memberikan efek nyata terhadap perkembangan industri karet. Kerja sama antar-pemangku kepentingan industri karet mulai terbentuk dengan baik. Bentuk konkret dari keberadaan sentra ini dapat dilihat dari souvenir Jambore Nasional Teluk Gelam dan SEA GAMES ke-26 Palembang yang telah memasuki pasar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet di Sumatra Selatan belum terjalin dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam hubungan antar-pemangku kepentingan industri karet antara lain: Ketidakpercayaan terhadap pelaku usaha lain, tertutupnya ide lain (nyaman dengan kondisi saat ini), kecenderungan paternalistik, ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan klaster industri karet yakni dengan memfasilitasi hubungan antar-pemangku kepentingan dalam pertukaran informasi.

SARAN

Untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam pertukaran informasi antar-pemangku kepentingan diperlukan seorang motor penggerak.

Tahapan pendirian sentra souvenir yang telah dilakukan perlu dibakukan dalam suatu protap pengembangan klaster industri karet. Pendalaman kasus perlu dilakukan terutama hubungan antarunsur bisnis dikarenakan belum semua jenis industri karet yang ada di survei.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Statistik Perkebunan. (<http://www.disbunsumsel.com/statistik.php?page=2>, diakses tanggal 8 November 2011)
- ²Analisis Perkembangan Harga. 2011. (<http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/Harga%20CPO%20Naik%20Seiring%20Kenaikan%20Harga%20Kedelai.pdf>, diakses tanggal 8 November 2011)
- ³Salam, S. A. 2000. *Potensi Klaster Komoditas Karet*. Jakarta: LIPI
- ⁴Taufik, T. A. 2011. *Pengembangan Klaster Industri dan Inovasi di Indonesia*. (<http://www.biskom.web.id/2011/02/18/pengembangan-klaster-industri-dan-inovasi-di-indonesia.bwi>, diakses tanggal 4 November 2011)
- ⁵Nugroho, B. P. 2011. *Panduan Pengembangan Klaster Industri*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi
- ⁶Saputra, D., H. Setiowiji, Sri Rahayu dan P. Pariyo. 2006. *Studi Klaster Industri Pengolahan Kakao*. Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek. Jakarta: LIPI Press
- ⁷Hall, A., Lynn K. Mytelka, and Banji Oyelaran-Oyeyinka. 2006. *Concepts and guidelines for diagnostic assessments of agricultural innovation capacity*. Working Paper. Maastricht: UNU-MERIT
- ⁸Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011
- ⁹Muntaha, S. 2011. Jumlah Pabrik Karet Berlebih. (<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/427932/>, diakses tanggal 10 November 2011)
- ¹⁰Nasruddin, dkk. 2010. *Pengembangan Klaster Industri Karet Berbasis Inovasi Teknologi*. Palembang: Balitbangda Sumsel

PUSTAKA PENDUKUNG

Departemen Perindustrian. 2009. *Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Berbasis Agro Tahun 2010–2014*. Buku II. Jakarta: Departemen Perindustrian

